



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS I B

JL. JEND. AHMAD YANI NO.33 KISARAN 21214

TELP./FAX : (0623) 41389 / 41390

EMAIL : MAIL@PN-KISARAN.GO.ID | WEBSITE : WWW.PN-KISARAN.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 jo. Nomor 1-144/SK/KMA/I/2011, tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Informasi yang dimuat dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini antara lain memberi gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Kisaran dan Wilayah Hukumnya, Informasi tentang data jumlah perkara, Laporan Keuangan, dan Laporan Kepegawaian serta berbagai pengembangan dan perubahan yang telah dilakukan terutama yang berhubungan dengan pengolahan data, penyediaan informasi bagi masyarakat dan peningkatan SDM bagi para Hakim dan aparaturnya Pengadilan lainnya sepanjang tahun 2022.

Dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini, kami berharap dapat memberikan informasi kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat. Atas segala kekurangan baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyelesaian laporan ini, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas di masa-masa yang akan datang.

Kisaran, 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

HALIDA RAHARDHINI, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Pengantar	li
Daftar Isi	iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
BAB II	A. KEADAAN PERKARAN DI PERADILAN UMUM.....	6
	• KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA.....	6
	• KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING.....	6
	• KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI.....	7
	• KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI.....	7
	B. PENYELESAIAN PERKARA.....	7
	• JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS.....	7
	• JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU.....	8
	• JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK.....	8
	• JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI.....	9
	• JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI.....	9
	C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (Sertifikat ISO Pengadilan).....	10
	• POSBAKUM.....	11
	• SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU.....	12
	• PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA).....	12
BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA.....	13
	• MUTASI.....	15
	• PROMOSI.....	16
	• PENSIUN.....	16
	• DIKLAT.....	16
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN , SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	21
	A. PENGELOLAAN KEUANGAN.....	21
	B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	27
	C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	28
	• IMPLEMENTASI <i>E-COURT</i> DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.....	28
	• IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.....	29
	• PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	32
BAB V	• AKREDITASI PENJAMIN MUTU.....	32
	• PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).....	33
	• INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	33
BAB VI	P E N G A W A S A N.....	35
	A. INTERNAL.....	35
	B. EVALUASI.....	36
BAB VII	PENUTUP.....	37
	A. KESIMPULAN.....	37
	B. REKOMENDASI.....	38
	C. LAMPIRAN.....	39

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1 B merupakan salah satu badan peradilan di lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran meliputi 2 (dua) Kabupaten Asahan dan Batu Bara, wilayah Kabupaten Asahan sebanyak 25 Kecamatan, kecuali Kec. Tanjung Balai, Kec. Sei Kepayang, Kec. Air Joman, Kec. Simpang Empat, Kec. Pulau Rakyat Kec. Bandar Pulau, dan seluruh Kabupaten Batu Bara sebanyak 12 Kecamatan.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Kisaran telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kebijakan yang diterapkan tahun 2022 tersebut berfokus pada pelayanan publik, dan beberapa kebijakan merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kisaran.

Adapun beberapa prioritas kebijakan umum yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2022 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Kisaran terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang dibawahnya, Pengadilan Negeri

Kisaran dari bulan Maret 2020 melaksanakan Persidangan secara Online dengan Aplikasi Zoom Meeting, sehingga para terdakwa tidak perlu datang ke kantor pengadilan, cukup melaksanakan persidangan melalui Zoom Meeting.

Pengadilan Negeri Kisaran sejak Tahun 2019 sudah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung RI No: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Tahun 2022 seluruh perkara sudah didaftarkan melalui e-Court. Sepanjang tahun 2022 ada 76 gugatan, 5 bantahan, 11 gugatan sederhana dan 124 permohonan yang di daftarkan melalui ecourt. Pengadilan Negeri Kisaran juga sudah menerapkan SK KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Terdapat 14 perkara gugatan, bantahan dan gugatan sederhana yang sudah bersidang secara elektronik/e-Litigasi dan para pihak langsung dapat mengambil salinan putusan yang bertanda tangan elektronik panitera di akun ecourt masing-masing pihak tanpa perlu datang ke pengadilan. Hal ini mewujudkan terciptanya asas peradilan yang mudah, sederhana dan berbiaya ringan.

2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan *template* dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen *template* hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. Di tahun 2018, manajemen perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) semakin disempurnakan dengan terus melakukan *update* sehingga per bulan Desember 2022 Pengadilan Negeri Kisaran telah menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan *update* terbaru (SIPP) V.5.1.0. yang mana terdapat penambahan fitur meliputi penambahan menu E-Berpadu. Pengadilan Negeri Kisaran juga telah melaksanakan Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang ditandai dengan telah aktifnya e-Court pada tanggal 31 Oktober 2019 dan sudah banyak Advokat dan Masyarakat yang sudah melalui aplikasi e-Court untuk Pendaftaran Perkara.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2022 masih terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut meliputi: peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan Website, dan peningkatan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan dan yang terbaru aplikasi elektronik berkas pidana terpadu (E-Berpadu) yang terintegrasi ke 3 (tiga) instansi yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

4. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No 7; 8; dan 9 Tahun 2016

Pengadilan Negeri Kisaran telah melaksanakan Sosialisasi tentang Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung No. 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

VISI dan MISI

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1 B memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Visi

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KISARAN YANG AGUNG “

2. Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kisaran
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kisaran
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kisaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1 B memiliki Motto yaitu:

MOTTO

“BERSAMA”

== BERINTEGRITAS, SANTUN, ADIL, MELAYANI, AKUNTABEL ==

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B sebagai kawal terdepan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B selain menjalankan tugas- tugasnya juga menjalankan fungsinya yang antara lain adalah:

- a. **Fungsi mengadili (judicial power)** yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi pembinaan** yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. **Fungsi pengawasan** yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. **Fungsi nasehat** yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi administratif** yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian/organisasi/ tatalaksanaan, dan keuangan/ umum/ perlengkapan).

- f. **Fungsi Lainnya** antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.



BAB II

A. KEADAAN PERKARAN DI PERADILAN UMUM

Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 44,5% dari tahun 2021. Berikut uraian keadaan perkara Pengadilan Negeri Kisaran.

• Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2021 dan Tahun 2022:

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk 2021	Perkara Masuk 2022
1	Pidana	1114	1021
2	Pidana Cepat	110	146
3	Pidana Praperadilan	10	14
4	Pidana Khusus Anak	30	27
5	Lalu Lintas	3.031	587
6	Perdata Gugatan	112	85
7	Perdata Permohonan	128	136
8	Gugatan Sederhana	8	11
9	Konsinyasi	69	29
Total Perkara		4612	2056

• Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2022:

No	Jenis Perkara	Perkara yang diputus 2022	Mengajukan Upaya Hukum (Banding)	Ket
1	Pidana	996	159	
2	Pidana Cepat	146	-	
3	Pidana Praperadilan	14	-	
4	Pidana Khusus Anak	26	2	
5	Perdata Gugatan	109	36	
6	Perdata Permohonan	137	-	
7	Gugatan Sederhana	10	-	

8	Permohonan Konsinyasi	16	-	
---	-----------------------	----	---	--

● **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2022:**

No	Jenis Perkara	Perkara yang diputus 2022	Perkara Masuk 2022	Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi)
1	Pidana	996	1021	92
2	Pidana Cepat	146	146	-
3	Pidana Praperadilan	14	14	-
4	Pidana Khusus Anak	26	27	4
5	Perdata Gugatan	109	85	23
6	Perdata Permohonan	137	136	-
7	Gugatan Sederhana	10	11	-
8	Permohonan Konsinyasi	16	29	-

● **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2022:**

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk 2022	Mengajukan Upaya Hukum (PK)	Ket
1	Pidana	1021	7	
2	Pidana Cepat	146	-	
3	Pidana Praperadilan	14	-	
4	Pidana Khusus Anak	27	-	
5	Perdata Gugatan	85	3	
6	Perdata Permohonan	136	-	
7	Gugatan Sederhana	11	-	
8	Permohonan Konsinyasi	29	-	

B. PENYELESAIAN PERKARA

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Kisaran tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut ini uraian keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Kisaran tahun 2022 :

● **Jumlah Sisa Perkara yang di Putus**

No	Jenis Perkara	Sisa Awal	Perkara Masuk 2022	Perkara yang diputus 2022	Sisa Perkara	Ket
1	Pidana	79	1021	996	104	
2	Pidana Cepat	-	146	146	0	
3	Pidana Praperadilan	-	14	14	0	

4	Pidana Khusus Anak	-	27	26	1	
5	Lalu Lintas	-	587	587	0	
6	Perdata Gugatan	44	85	109	20	
7	Perdata Permohonan	1	136	137	-	
8	Gugatan Sederhana	-	11	10	1	
9	Permohonan Konsinyasi	-	29	16	13	

● **Jumlah Perkara Yang di Putus Tepat Waktu**

No	Jenis Perkara	Sisa Awal	Perkara Masuk 2022	Perkara yang diputus 2022	Perkara yang di Putus Tepat Waktu
1	Pidana	79	1021	996	996
2	Pidana Cepat	-	146	146	146
3	Pidana Praperadilan	-	14	14	14
4	Pidana Khusus Anak	-	27	26	26
5	Lalu Lintas	-	587	587	587
6	Perdata Gugatan	44	85	109	20
7	Perdata Permohonan	1	136	137	-
8	Gugatan Sederhana	-	11	10	1
9	Permohonan Konsinyasi	-	29	16	13

● **Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK**

PERKARA BANDING :

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk 2022	Perkara diputus 2022	Perkara Banding	Perkara yang Tidak banding
1	Pidana	1021	996	159	837
2	Pidana Cepat	146	146	-	-
3	Pidana Praperadilan	14	14	-	-
4	Pidana Khusus Anak	27	26	2	24
5	Perdata Gugatan	85	109	36	73
6	Perdata Permohonan	136	137	-	137
7	Gugatan Sederhana	11	10	-	10
8	Permohonan Konsinyasi	29	16	-	16

PERKARA KASASI :

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk 2022	Perkara diputus 2022	Perkara Kasasi	Perkara yang Tidak Kasasi
1	Pidana	1021	996	92	904
2	Pidana Cepat	146	146	-	-
3	Pidana Praperadilan	14	14	-	-
4	Pidana Khusus Anak	27	26	4	2
5	Perdata Gugatan	85	109	23	86
6	Perdata Permohonan	136	137	-	137
7	Gugatan Sederhana	11	10	-	10
8	Permohonan Konsinyasi	29	16	-	16

PERKARA PENINJAUAN KEMBALI :

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk 2022	Perkara diputus 2022	Perkara PK	Perkara yang Tidak PK
1	Pidana	1021	996	7	989
2	Pidana Cepat	146	146	-	-
3	Pidana Praperadilan	14	14	-	-
4	Pidana Khusus Anak	27	26	-	-
5	Perdata Gugatan	85	109	3	106
6	Perdata Permohonan	136	137	-	137
7	Gugatan Sederhana	11	10	-	10
8	Permohonan Konsinyasi	29	16	-	16

JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI :

No	Bagian	Perkara Masuk 2022	Perkara diputus 2022	Mediasi	Ket
1	Perdata Gugatan	85	107	4	

JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHASIL DIVERSI :

No	Bagian	Perkara Masuk 2022	Perkara diputus 2022	Berhasil Diversi	Ket
1	Pidana Khusus Anak	27	26	1	

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan Penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2008 dan diperkaya dengan penerapan *International Framework for Court Excellent*, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana badan akreditasi lainnya dalam memberikan standar penilaian kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Penjaminan mutu merupakan serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent–ICPE*) melalui penilaian terhadap 7 kriteria :

1. Kepemimpinan (*Leadership*)
2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*)
3. Fokus Pelanggan (*Costumer Focus*)
4. Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*)
5. Proses Manajemen (*Management Process*)
6. Sistem Dokumen (*Document System*)
7. Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus-menerus memperbaiki system pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Pengadilan Negeri Kisaran sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum tentunya berkewajiban untuk turut menyukseskan program dari

Dirjen Badan Peradilan Umum tersebut dengan menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Kisaran perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai.

Pengadilan Negeri Kisaran telah dinyatakan berhasil dalam menyediakan standar pelayanan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam program Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut dengan diterimanya Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum pada tanggal 29 Nopember 2017 di Makassar dengan nilai “A” (*Excellent*). Setelah itu, pada saat dilakukan assesmen surveilan kedua pada tanggal 3 November 2022 oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Medan, dan sudah dilakukan KEKA Badan Peradilan Umum tanggal 3 November 2022 Pengadilan Negeri Kisaran berhasil mempertahankan nilai tersebut.

Prestasi tersebut tentunya merupakan awal dari sebuah usaha untuk terus memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan yang merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.

● **POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1 B menyediakan Pos Layanan Bantuan Hukum untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan di luar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materil di dalam persidangan.

Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kisaran dilaksanakan oleh LBH CAKRAWALA NUSANTARA INDONESIA (YLBH-CNI) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dan LBH tersebut serta Surat Perintah Kerja Nomor W2.U11/6/KU.03.05/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 dari PPK

Pengadilan Negeri Kisaran.

Anggaran yang dialokasikan pada DIPA Pengadilan Negeri Kisaran Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-005.03.2.400390/2022 tanggal 17 November 2022 adalah sebesar Rp. 31.200.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Anggaran tersebut adalah untuk membayar Honor advokat/ pengacara piket yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam piket. Per tanggal 31 Desember 2022 anggaran tersebut berhasil direalisasikan sepenuhnya.

• **SIDANG KELILING/ PELAYANAN TERPADU**

Tidak ada kegiatan Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1 B sepanjang tahun 2022.

• **PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)**

Pembebasan biaya perkara diperuntukkan untuk masyarakat miskin namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara. Pengadilan Negeri Kisaran tahun Anggaran 2022 tidak memiliki alokasi anggaran pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin pada DIPA Pengadilan Negeri Kisaran.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Khususnya di Lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur Pengadilan Negeri Kisaran) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan. Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu setiap sumber daya manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*).

Pada tahun 2022, jumlah sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Kisaran mendapat penambahan 4 (empat) orang CPNS, yang ditempatkan pada Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Dan pada tahun 2022, jabatan Jurusita dan Wakil Ketua sudah terisi, 1 (satu) orang Panitera Pengganti yang meninggal dunia sehingga masih terdapat kekurangan staf pelaksana, Sumber daya manusia meliputi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Kisaran.

Pengadilan Negeri Kisaran memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 33 (tiga puluh empat) orang, sehingga jumlah SDM yang ada saat ini sangatlah tidak ideal untuk sebuah Pengadilan Negeri Kelas 1 B yang menangani lebih dari 1.000 perkara setiap tahunnya, Pengadilan Negeri Kisaran sudah memiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pemeriksa dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran yang bersertifikasi.

Berikut Rincian kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Kisaran. Rincian sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Nama	Jabatan
1.	Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.	Ketua
2.	Erika Sari Emsah Ginting, SH., MH	Wakil
3.	Yohana Timora Pangaribuan., SH., M.Hum.	Hakim
	Miduk Sinaga., SH.	
	Antoni Trivolta., SH.	
	Nelly Rakhmasari Lubis., SH., M.H.	
	Tetty Siska., SH., M.H.	
	Irse Yanda Perima., SH., M.H.	
4.	Idris., SH.	Panitera
5.	Mediana Br. Tarigan., SE.	Sekretaris
6.	Buyung Hardi., SH.	Panitera Muda Perdata
7.	Addhie Yus Pramana Putra., SH., M.H.	Panitera Muda Pidana
8.	Doharni Siregar.	Panitera Muda Hukum
9.	Noni Aprianti Damanik, SH.	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan
10.	Muhammad Reza Lubis, SH	Kasubbag Kepegawaian & Ortala
11.	Diana Romin Harahap, SH.	Kasubbag Umum dan Keuangan
12.	Darwis Tarigan, SH . Ali Ustaz . Helmi. Sitiur Mala Sitorus, SH. Meilan Monanita., SH.	Panitera Pengganti
13	Mursal Pahri.	Jurusita
14.	Mhd. Saleh. Aser Hutabarat.	Jurusita Pengganti

15.	Subakti, SH. Ribka Br. Ginting.	Analisis Perkara Peradilan
16.	Apriyanti Mandasari Siahaan, S.Sos	Analisis SDM Aparatur
17.	Desy Ratnasari Purba, A.Md.AB	Arsiparis
18.	Iin Angelina Pangaribuan, A.Md	Pengadministrasi Registrasi Perkara
19.	Muhammad Fikry Harahap, S.H Arnimisari Juliana Ambarita, S.Sos Hana Serbina Br. Sembiring, S.H Nelly Saputri Manalu, A.Md	CPNS

• **MUTASI**

Mutasi masuk pada Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Asal	Tujuan
1.	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB
2.	Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat Kelas IB	Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB

Mutasi keluar pada Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Asal	Tujuan
1.	Immanuel Tarigan, S.Kom	Pengelola Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Kisaran	Analisis Tata Laksana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA
2.	Nelson Angkat, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Kisaran	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas IA

• **PROMOSI**

Pelaksanaan promosi pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Kisaran adalah sejumlah 4 (empat) orang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan Asal	Tujuan
1.	Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat Kelas IB	Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB
2	Nelson Angkat., SH., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas IA
3	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H	Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB
4	Mursal Pahri	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IIB	Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB

• **PENSIUN**

Sepanjang tahun 2022 terdapat 1 (satu) Pegawai di Pengadilan Negeri Kisaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Masa Pensiun	Ket.
1.	Azhar,S.H	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran	10 November 2022	Meninggal Dunia

• **DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)**

Sepanjang tahun 2022 SDM Teknis/ Non Teknis yang mengikuti diklat adalah :

No.	Nama Diklat	Nama Peserta	Tempat diklat
1.	Latsar CPNS	Iin Angelina Pangaribuan, Amd. A.B.	Aplikasi Zoom Meeting ; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim)
2.	Latsar CPNS	Desy Ratnasari Purba, Amd. A.B.	Aplikasi Zoom Meeting ; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim)
3.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH : Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial	Irse Yanda Perima, S.H., M.H.	Hotel Grand Mercur Medan Angkasa
4.	Pelatihan singkat Panitera Pengganti secara online	Idris, S.H., M.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum

			dan Peradilan MA-RI
5.	Pelatihan singkat Panitera Pengganti secara online	Buyung Hardi, S.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI
6.	Pelatihan singkat Panitera Pengganti secara online	Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI
7.	Pelatihan singkat Panitera Pengganti secara online	Azhar, S.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI
8.	Pelatihan singkat Panitera Pengganti secara online	Darwis Tarigan, S.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI
9.	Pelatihan singkat Panitera Pengganti secara online	Ali Ustaz	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI
10.	Pelatihan singkat Panitera Pengganti secara online	Helmi, S.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI
11.	Pelatihan ECSCS Preparation Test Batch 1 dan 2 secara online	Ribka Br Ginting, S.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI
12.	Pelatihan singkat Panitera Pengganti secara online	Doharni Siregar	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI
13.	Pelatihan singkat Panitera Pengganti secara online	Meilan Monanita, S.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI
14	Pelatihan singkat Panitera Pengganti secara online	Sitiur Mala Sitorus, S.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI
15	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana bagi Hakim peradilan umum	Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI
16	Pelatihan online bagi anggota Badan Peradilan (Indonesia dan Malaysia) dalam Persidangan Perkara Pidana Yang Menghadirkan Bukti	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI
17	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.	Hotel Le Polonia Medan

18	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	Aser Hutabarat	Hotel Le Polonia Medan
19	Pelatihan Sertifikasi Profesional Trainer bagi Pengajar Muatan Lokal Pengadilan Tahun 2022	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Kampus Badan Litbang Diklat Humum dan Peradilan Bogor
20	Peserta Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	Irse Yanda Perima, S.H., M.H.	Batam
21	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum MA RI	Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.	Hotel Grand Mercu Medan Angkasa
22	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum MA RI	Antoni Trivolta, S.H.	Hotel Grand Mercu Medan Angkasa
23	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum MA RI	Tetty Siskha, S.H.	Hotel Grand Mercu Medan Angkasa
24	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum MA RI	Idris, S.H., M.H.	Hotel Grand Mercu Medan Angkasa
25	Latsar CPNS	Muhammad Fikry Harahap, S.H.	Blended Learning : Virtual Zoom & Penutupan di Balai Diklat Keagamaan Medan
26	Latsar CPNS	Hana Serbina Br Sembiring, S.H.	Blended Learning : Virtual Zoom & Penutupan di Balai Diklat Keagamaan Medan
27	Latsar CPNS	Arnimisari Juliana Ambarita, S.Sos	Blended Learning : Virtual Zoom & Penutupan di Balai Diklat Keagamaan Medan
28	Latsar CPNS	Nelly Saputri Manalu, Amd.	Blended Learning : Virtual Zoom & Penutupan di Balai Diklat Keagamaan Medan
29	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan MA RI berbasis Akrua l T A 2022	Diana Romin Harahap, S.H.	Hotel Emerald Garden
30	Asistensi	Apriyanti Mandasari	Hotel Emerald Garden

	Penyusunan Laporan Keuangan MA RI berbasis Akrual T A 2023	Siahaan, S.Sos.	
31	Pelatihan Online Penyusunan SPIP Integratif Angkatan 1 s.d 5	Diana Romin Harahap, S.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI
32	Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Bogor
33	Sosialisasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu	Nelson Angkat, S.H., M.H.	Cambridge Hotel Medan
34	Sosialisasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu	Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.	Cambridge Hotel Medan
35	Sosialisasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu	Desy Ratnasari Purba, Amd. A.B.	Cambridge Hotel Medan
36	Pelatihan Online Penyusunan Laporan Kinerja 1 s.d. 5	Diana Romin Harahap, S.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI
37	Sosialisasi SPPT-TI	Miduk Sinaga, S.H.	Hotel Grand City Hall Medan
38	Sosialisasi SPPT-TI	Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.	Hotel Grand City Hall Medan
39	Diskusi Publik "Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai Instrumen Hukum dalam Menjamin Hak Warga Negara atas Perlindungan Diri Pribadi	Irse Yanda Perima, S.H., M.H.	Four Point By Sheraton Medan
40	Bimbingan Teknis Keuangan dan Perencanaan	Diana Romin Harahap, S.H.	Hotel Le Polonia Medan
41	Bimbingan Teknis Keuangan dan Perencanaan	Noni Afrianti Damanik, S.H.	Hotel Le Polonia Medan
42	Bimbingan Teknis Keuangan dan Perencanaan	Doharni Siregar	Hotel Le Polonia Medan
43	Bimbingan Teknis Keuangan dan Perencanaan	Ribka Br Ginting, S.H.	Hotel Le Polonia Medan
44	Sosialisasi Perpajakan bagi Instansi Pemerintah dan	Apriyanti Mandasari Siahaan, S.Sos.	KPPN Tanjung Balai

	Sosialisasi Anti Gratifikasi serta Saluran Pengaduan KPPN Tanjung Balai		
45	Bimbingan Teknis Kepegawaian	Buyung Hardi, S.H.	Hotel Le Polonia Medan
46	Bimbingan Teknis Kepegawaian	Muhammad Reza Lubis, S.H.	Hotel Le Polonia Medan
47	Bimbingan Teknis Umum dan Kehumasan	Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.	Hotel Le Polonia Medan
48	Bimbingan Teknis Umum dan Kehumasan	Idris, S.H., M.H.	Hotel Le Polonia Medan
49	Bimbingan Teknis Umum dan Kehumasan	Mediana Br Tarigan, S.E	Hotel Le Polonia Medan
50	Sosialisasi PNBP online	Idris, S.H., M.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Pengadilan Tinggi Medan
51	Sosialisasi PNBP online	Buyung Hardi, S.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Pengadilan Tinggi Medan
52	Sosialisasi PNBP online	Subakti, S.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Pengadilan Tinggi Medan
53	Sosialisasi PNBP online	Ribka Br Ginting, S.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Pengadilan Tinggi Medan
54	Sosialisasi PNBP online	Sitiur Mala Sitorus, S.H.	Aplikasi Zoom Meeting ; Pengadilan Tinggi Medan
55	Rapat Koordinasi Bendahara Pengeluaran	Apriyanti Mandasari Siahaan, S.Sos.	Novotel Jakarta Gajah Mada
56	Rapat Koordinasi Barang/Jasa dan Teknologi Informasi	Noni Afrianti Damanik, S.H.	Aryaduta Menteng Jakarta



BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi Anggaran Teknis (DIPA 03)

Total alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang bersifat teknis pada Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebesar Rp. 264.400.000,- (Dua Ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Pengadilan Negeri Kisaran Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-005.03.2.400390/2022 tanggal 17 November 2021. Jumlah tersebut di atas seluruhnya merupakan pagu anggaran untuk belanja barang.

DIPA tersebut mengalami revisi administrasi berupa *update* Halaman III DIPA sebanyak 5 (lima) kali dan penyamaan data hasil revisi POK sebanyak 5 (lima) kali tanpa mengakibatkan perubahan atas nilai total pagu dalam rangka peningkatan efektivitas penyerapan anggaran.

Adapun **realisasi** terhadap anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

BELANJA BARANG				
NO	PAGU DIPA Rp	REALISASI / PELAKSANAAN Rp %		SISA SD SAAT INI Rp
1	264.400.000,-	263.548.150,-	99,68,-	851.850,-

Rincian Belanja Barang Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022:

No	Uraian	Pagu Belanja Rp	Realisasi Belanja Rp	%
1.	Belanja Pengiriman Berkas Banding dan Kasasi Pos	20.663.000,-	20.654.500,-	99,96,-
2.	Belanja Bahan dan Minutasi	12.182.000,-	12.163.000,-	99,96,-
3.	Belanja ATK Perkara Pidana	94.886.000,-	94.879.650,-	99,99,-
4.	Belanja Jasa Advokat Piket POSBAKUM	31.200.000,-	31.200.000,-	100,-
5.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.285.000,-	65.541.000,-	98,87,-
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.184.000,-	39.110.000,-	99,81,-
	Jumlah	264.400.000,-	263.548.150,-	98,99,-

Realisasi Anggaran Non Teknis (DIPA 01)

Total alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang bersifat non teknis pada Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebesar Rp. 5.517.105.000,- (Lima milyar lima ratus tujuh belas juta seratus lima ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Pengadilan Negeri Kisaran Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-005.01.2.400389/2022 tanggal 17 November 2021. Jumlah tersebut di atas seluruhnya merupakan pagu anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

DIPA Pengadilan Negeri Kisaran mengalami 8 (delapan) kali revisi DIPA berupa *update* Halaman III DIPA, penyamaan data revisi POK dan revisi penambahan pagu anggaran untuk belanja pegawai dan belanja langganan listrik. Rincian realisasi anggaran tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai:

NO	BELANJA PEGAWAI			
	REVISI PAGU DIPA	REALISASI/PELAKSANAAN		SISA SD SAAT INI
	Rp	Rp	%	Rp
1	3.960.645.000,-	3.955.495.369,-	99,87	5.149.631,-

Rincian Realisasi Belanja Pegawai :

No	Uraian	Pagu Belanja Rp	Realisasi Belanja Rp	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.612.483.000,-	1.609.353.540,-	99,81,-
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.000,-	22.314,-	89,26,-
3	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	119.600.000,-	119.597.440,-	100,-
4	Belanja Tunjangan Anak PNS	37.880.000,-	37.878.492,-	100,-
5	Belanja Tunjangan Struktural PNS	36.400.000,-	36.400.000,-	100,-
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.578.730.000,-	1.578.730.000,-	100,-
7	Belanja Tunjangan PPH PNS	177.101.000,-	177.098.543,-	100,-
8	Belanja Tunjangan Beras PNS	95.016.000,-	95.015.040,-	100,-
9	Belanja Uang Makan PNS	281.220.000,-	279.210.000,-	99,29,-
10	Belanja Tunjangan Umum PNS	22.190.000,-	22.190.000,-	100,-
	Total	3.960.645.000,-	3.955.495.369,-	99,87,-

Belanja Barang:

NO	BELANJA BARANG			
	PAGU DIPA	REALISASI/PELAKSANAAN		SISA SD SAAT INI
	Rp	Rp	%	Rp
1	1.492.460.000,-	1.481.132.708,-	98,99,-	11.327.292,-

Rincian Belanja Barang Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022:

No	Uraian	Pagu Belanja Rp	Realisasi Belanja Rp	%
1.	Belanja Barang Operasional	450.431.000,-	443.513.821,-	98,46,-
2.	Belanja Barang Persediaan	57.833.000,-	57.820.720,-	99,98,-
3.	Belanja Jasa	417.367.000,-	416.186.524,-	99,72,-
4.	Belanja Pemeliharaan	533.929.000,-	531.291.643,-	99,51,-
5.	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	27.900.000,-	27.420.000,-	98,28,-
6.	Belanja Barang Non Operasional #	5.000.000,-	4.900.000,-	98,00,-
Jumlah		1.492.460.000,-	1.481.132.708,-	98,99,-

Belanja Modal:

NO	BELANJA MODAL			
	PAGU DIPA	REALISASI/PELAKSANAAN		SISA SD SAAT INI
	Rp	Rp	%	Rp
1	64.000.000,-	64.000.000,-	100,-	0,-

Rincian Belanja Modal Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022:

No	Uraian	Pagu Belanja Rp	Realisasi Belanja Rp	%
1.	PC Kewanitaraan	54.000.000,-	54.000.000,-	100,-
2.	Printer	10.000.000,-	10.000.000,-	100,-
Jumlah		64.000.000,-,-	64.000.000,-	100,-

Manajemen Aset Barang Milik Negara

Manajemen aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Kisaran mengelola aset/ barang milik Negara meliputi :

1. Tanah

Beberapa aset Negara berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022 dapat dilihat di bawah ini :

Daftar Sarana dan Prasarana Tanah Pengadilan Negeri Kisaran

No	Tanah	Jumlah Bidang Tanah	Total Luas Tanah (m2)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	6	4,229
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	5,269

2. Gedung dan Bangunan

Daftar Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pengadilan Negeri Kisaran yaitu;

No	Gedung Bangunan	Satuan (Unit)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1
3	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	1
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	12
5	Pagar Permanen	1
6	Bangunan Ruang Sidang Anak	1

Dari tabel diatas Pengadilan Negeri Kisaran ada Rehabilitasi Gedung Bagunan yaitu Ruang sidang Anak yang Anggarannya dari APBD Kabupaten Asahan.

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pengadilan Negeri Kisaran per 31 Desember 2022 yaitu :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Minibus Toyota Kijang (BK 615 V)	2004	-	Rusak Ringan	-	Pinjam pakai dari Pemkab Asahan
2.	Minibus Toyota Innova (BK 4 V)	2008	Baik	-	-	Milik sendiri
3.	Minibus Toyota Innova (BK 1147 BB)	2014	Baik	-	-	Hibah dari Pemkab Batu Bara
4.	SUV Mitsubishi Pajero (BK 1241 V)	2017	Baik	-	-	Pinjam pakai dari Pemkab Asahan
5.	SUV Mitsubishi Pajero (BK 1192 BB)	2018	Baik	-	-	Hibah dari Pemkab Batu Bara
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda NF125SD	2005		Rusak	-	BK 2256 V

				Ringan		
2.	Honda NF125SD	2005	-	Rusak Ringan	-	BK 2257 V
3.	Honda NF125SD	2005	-	Rusak Ringan	-	BK 2202 V
4.	Honda NF125SD	2007	-	Rusak Ringan	-	BK 2391 V
5.	Honda NF125SD	2008	-	Rusak Ringan	-	BK 2763 V
6.	Honda NF125SD	2008	-	Rusak Ringan	-	BK 2777 V

4. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	Baik	-	-	-
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	Baik	-	-	-
3.	Rumah Dinas Hakim	8	6 Baik	1 Rusak Ringan	1 Rusak Berat	-
4.	Rumah Dinas Panitera	1	Baik	-	-	-
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	Baik	-	-	-

5. Sarana/ Prasarana

No	Sarana/ Prasarana Gedung	Jumlah (Unit)	Keterangan
I	Ruangan		
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	1	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang	5	Baik
7	Ruang Panitera Muda Pidana	1	Baik
8	Ruang Panitera Muda Perdata	1	Baik
9	Ruang Panitera Muda Hukum	1	Baik
10	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
11	Ruang Umum dan Keuangan	1	Baik
12	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Baik
13	Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan	1	Baik
14	Ruang Perpustakaan	1	Baik
15	Ruang Mediasi	1	Baik
16	Ruang Caucus	1	Baik
17	Ruang Tunggu Laktasi/Kesehatan	1	Baik

18	Ruang Teleconference	1	Baik
19	Ruang Arsip Pidana	1	Baik
20	Ruang Arsip Perdata	1	Baik
21	Ruang Tunggu Umum	1	Baik
22	Ruang/Kantin	1	Sederhana
23	Ruang Posbakum	1	Baik
24	Ruang/Musholah	1	Baik
25	Ruang Jaksa	1	Baik
26	Ruang Humas	1	Baik
27	Ruang PTSP	1	Baik
II	Ruang Rapat	1	Baik
1	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
2	Mesin Pompa air PMK	1	
3	Lemari Penyimpan	0	
4	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	
5	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	2	
6	Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inchi)	5	
7	Mesin Hitung Manual	1	
8	Lemari Kayu	31	
9	Rak Besi	7	
10	Rak Kayu	15	
11	Filing Cabinet Besi	42	
12	Brandkas	5	
13	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	
14	Lemari Display	3	
15	Tabung Pemadam Api	8	
16	CCTV – Camera Control Television System	5	
17	Papan Visual/Papan Nama	2	
18	White Board	11	
19	Mesin Absensi	2	
20	Overhead Projector	1	
21	Hand Metal Detector	1	
22	Perkakas Kantor Lainnya	6	
23	Meja Kerja Kayu	192	
24	Kursi Besi/Metal	150	
25	Kursi Kayu	126	
26	Sice	12	
27	Bangku Panjang Besi/Metal	14	
28	Bangku Panjang Kayu	59	
29	Meja Rapat	4	
30	Meja Komputer	2	
31	Meja Resepsionis	2	
32	Sketsel	4	
33	Kursi Fiber Glas/Plastik	31	
34	Jam Mekanis	4	
35	Mesin Pemotong Rumput	1	
36	A.C. Split	21	
37	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	

38	Kipas Angin	13	
39	Televisi	4	
40	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	2	
41	Amplifier	1	
42	Loudspeaker	7	
43	Sound System	3	
44	Wireless	2	
45	Microphone	17	
46	Lambang Garuda Pancasila	2	
47	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	
48	Lambang Instansi	1	
49	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	
50	Analog/Digital Receiver	1	
51	Camera Digital	1	
52	LCD Monitor	1	
53	Pesawat Telephone	13	
54	Facsimile	3	
55	Genset	1	
56	P.C Unit	45	
57	Lap Top	9	
58	Note Book	9	
59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31	
60	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	
61	Server	1	
62	Router	1	
63	Genset	1	
64	Sound System	1	
65	Kursi Ruang PTSP	6	
66	Termo Gun	1	
67	Anjungan Mesin Antrian	2	

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Nama Asset (Belanja Modal)	Jumlah (Unit/Set)	Harga Persatuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	PC Komputer Kepaniteraan	4	13.500.000,-	54.000.000,-
2	Printer	2	5.000.000,-	10.000.000,-

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

a. Pembukuan, Pencatatan, dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)

Selama periode tahun anggaran 2022, Pengadilan Negeri Kisaran secara rutin dan kontiniu melaksanakan pembukuan, pencatatan, dan pelaporan Barang Milik Negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menggunakan aplikasi Persediaan, SIMAK – BMN, SIMAN, dan SIMANTAP yang merupakan produk Kementerian Keuangan.

b. Penghapusan Asset /Barang Milik Negara (BMN)

Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Kisaran telah melaksanakan penghapusan BMN berupa peralatan mesin dan meubelair dengan cara penjualan/lelang secara online yang diselenggarakan oleh KPKNL Kisaran. Seluruh Barang Milik Negara yang di jual/lelang dalam kondisi rusak berat dan terjual dengan total harga Rp. 664.650,- dan hasil penjualan telah disetor ke Kas Negara.

c. Revaluasi (Penilaian Kembali) Barang Milik Negara (BMN)

Pengadilan Negeri Kisaran bekerjasama dengan KPKNL Kisaran telah selesai melaksanakan revaluasi atau penilaian kembali barang milik negara di lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2017. Revaluasi tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) bidang tanah dan 17 (tujuh belas) unit gedung dan bangunan.

Tidak ada lagi kegiatan revaluasi yang dilakukan pada tahun 2022.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

• Implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Kisaran

Pengadilan Negeri Kisaran juga telah melaksanakan Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019. Tahun 2022 seluruh perkara sudah didaftarkan melalui e-Court. Sepanjang tahun 2022 ada 76 gugatan, 5 bantahan, 11 gugatan sederhana dan 124 permohonan yang di daftarkan melalui ecourt. Pengadilan Negeri Kisaran juga sudah menerapkan SK KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Terdapat 14 perkara gugatan, bantahan dan gugatan sederhana yang sudah bersidang secara elektronik/e-Litigasi dan para pihak langsung dapat mengambil salinan putusan yang bertanda tangan elektronik panitera di akun ecourt masing-masing pihak tanpa

perlu datang ke pengadilan. Hal ini mewujudkan terciptanya asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang ditandai dengan telah aktifnya *e-court* pada tanggal 31 Oktober 2019.

● Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Kisaran

Dukungan teknologi informasi tidak hanya diperlukan untuk kepentingan layanan kepada publik, namun sangat diperlukan dalam percepatan proses Administrasi dalam lingkungan Pengadilan. Hal ini diperkuat dengan adanya aplikasi administrasi mulai dari KOMDANAS, SIMARI, SIMPONI, SIKEP, (Sistem informasi Kepegawaian), SEPEDA, SIMAK-BMN, SAIBA, SAKTI, E-BIMA, SIMPEG, SIWAS, Aplikasi SIPT (sistem informasi pidana terintegrasi), Aplikasi Sitasya (Silakan tanya saya) Informasi tentang info Perkara dan lain sebagainya.

Upaya meningkatkan pelayanan publik menuju pelayanan prima, Pengadilan Negeri Kisaran telah menggunakan teknologi informasi dalam usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan profesional dalam memberikan pelayanan yang maksimal, bermartabat transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang telah dicanangkan Mahkamah Agung R.I. Berikut sarana dan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kisaran.

Perangkat Lunak

Untuk menunjang sarana dan prasarana, khususnya perangkat keras (hardware) pada Pengadilan Negeri Kisaran selanjutnya telah dilengkapi dengan beberapa perangkat lunak (software) guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, baik secara kelembagaan maupun secara personal dari masing-masing aparat peradilan. Berikut beberapa perangkat lunak (software) yang terdapat pada perangkat keras di Pengadilan Negeri Kisaran perangkat lunak (software) pada Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2022

No	Nama perangkat lunak (software)	Fungsi
1.	Aplikasi Perpustakaan	Dapat membantu petugas pustaka dalam menginventarisir buku-buku perpustakaan dan memudahkan pengguna dalam mencari buku-buku yang berada di perpustakaan Pengadilan Negeri Kisaran. Pada saat ini masih dalam tahap pelaksanaan.
2.	Aplikasi E-Super	Optimalisasi Penyelenggaraan Administrasi Barang Persediaan melalui Aplikasi Pengajuan Permintaan Barang Persediaan Berbasis Internet bagi Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran
3.	Aplikasi Silaci Satu Online	Sistem Layanan Cuti, Sakit, dan Surat Tugas Online

		bagi Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran
4.	SIPP	Administrasi perkara
5.	E-Rekon, GPP, SAIBA, SAS, PPSPM, OM-SPAN, MONEV-PA	Administrasi keuangan
6.	SAPK, SIKEP, SEPEDA	Administrasi kepegawaian
7.	Persediaan, SIMAK BMN	Administrasi barang milik negara
8.	SAKTI (sistem aplikasi keuangan tingkat instansi)	Administrasi Perencanaan Anggaran dan Revisi Anggaran
9.	Aplikasi MIS	Monitoring Implementasi SIPP
10.	Aplikasi e-Court	Administrasi Pendaftaran Perkara secara Online
11.	Aplikasi Panggilan Sidang	Sistem Layanan Panggilan Sidang kepada para pihak yang bersidang
13.	Aplikasi PTSP	Pendistribusian Surat Masuk melalui Elektronik
14.	Monitor Jadwal Sidang	Pengumuman Jadwal Sidang
15.	Aplikasi SIPT (Sistem Informasi Pidana Terpadu)	Sistem Informasi Pidana yang mengintegrasikan dengan Stakeholder yang terkait.
16.	E- Brosur	Brosur Elektronik Informasi layanan
17.	Aplikasi Sitasya	Sistem Informasi berbasis WhatsApp (WA) Gate-Way yang menginformasikan tentang info Perkara, Jadwal Sidang, Tilang, Sisa Panjar, Putusan, Sita/ Geledag.
18.	Era Terang	Layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP maupun Komputer/PC)
19.	Aplikasi E-Berpadu	Integrasi berkas pidana antar Penegak Hukum untuk layanan permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, penetapan diversifikasi, dan izin besuk tahanan
20.	JDIH	wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat
21.	E-Bima	Aplikasi untuk Memonitoring Pelaksanaan Anggaran di Mahkamah Agung dan Satker dibawahnya
22.	E-Iplans	Sebuah Sistem Untuk Menyusun Anggaran Dengan Tahapan Berjenjang Pada Satuan Kerja Di Bawah Mahkamah Agung RI

Selain perangkat lunak yang disebutkan diatas Pengadilan Negeri Kisaran juga sudah mempunyai website dengan nama domain www.pn-kisaran.go.id, selain itu juga penampilan aplikasi SIPP secara online dengan situs sipp.pn-kisaran.go.id untuk mempermudah akses informasi pencari keadilan dan aplikasi perpustakaan secara online dengan situs perpustakaan.pn-kisaran.go.id untuk dapat meminjam dan membaca buku pada koleksi pustaka digital yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kisaran. Aplikasi ini dapat diunduh langsung di perangkat komputer ataupun handphone/smartphone kita, baik yang memiliki sitem operasi Android maupun IOS.



BAB V PENINGKAT PELAYANAN PUBLIK

• Akreditasi Penjamin Mutu

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan Penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2008 dan diperkaya dengan penerapan *International Framework for Court Excellent*, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana badan akreditasi lainnya dalam memberikan standar penilaian kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Negeri Kisaran merupakan Pengadilan yang ikut serta dalam Daftar peserta Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan sudah dilakukan Desk Evaluasi Zona Integritas Tahun 2022, Pengadilan Negeri Kisaran belum berhasil menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penjaminan mutu merupakan serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent –ICPE*).

Akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus-menerus memperbaiki system pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Pengadilan Negeri Kisaran sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum tentunya berkewajiban untuk turut menyukseskan program dari Dirjen Badan Peradilan Umum tersebut dengan menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk

mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Kisaran perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai.

Pengadilan Negeri Kisaran telah dinyatakan berhasil dalam menyediakan standar pelayanan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam program Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut dengan diterimanya Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum pada tanggal 29 Nopember 2017 di Makassar dengan nilai “A” (*Excellent*). Setelah itu, pada saat dilakukan assesmen surveilan pertama pada tanggal 7 Mei 2019 oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Medan, dan sudah dilakukan KEKA Badan Peradilan Umum tanggal 3 November 2022 Pengadilan Negeri Kisaran berhasil mempertahankan nilai tersebut.

Prestasi tersebut tentunya merupakan awal dari sebuah usaha untuk terus memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan yang merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.

● **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2019 masih terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut meliputi: peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan Website, dan peningkatan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan.

● **Inovasi Pelayanan Publik**

Pengadilan Negeri Kisaran juga sudah mempunyai website dengan nama domain www.pn-kisaran.go.id, selain itu juga penampilan aplikasi SIPP secara online dengan situs sipp.pn-kisaran.go.id untuk mempermudah akses informasi pencari keadilan dan

Aplikasi Sitasya (silakan tanya saya) merupakan inovasi berbasis WhatsApp (WA) Gate-Way yang menginformasikan tentang Perkara, Jadwal sidang, Info Tilang, Sisa Panjar, Putusan, Sita/Geledah. Pengadilan Negeri Kisaran membuat Inovasi Aplikasi SIPT (sistem informasi pidana terpadu) suatu Aplikasi andalan Pengadilan Negeri Kisaran yang mana sangat membantu Stakeholder yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Lembaga Perasyarakatan, dimana Polisi bisa mengajukan permohonan izin sita dan izin geledah melalui Aplikasi SIPT.

Pengadilan Negeri Kisaran juga sudah menarapkan Area Steril yang mana para pencari keadilan tidak bisa dengan bebas untuk memasuki Area Steril tersebut dikarenakan menggunakan Access Card Door, dan untuk Sarana dan Prasarana para pencari keadilan Pengadilan Negeri Kisaran sudah menyiapkan Ruang Tunggu yang dilengkapi Ac dan Televisi.



BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan rutin / reguler secara kelembagaan adalah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawas Mahkamah Agung dan juga oleh Pengadilan Tinggi Medan yang dilakukan secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik secara administratif maupun secara teknis peradilan, sedangkan pengawasan dalam tubuh instansi Pengadilan Negeri Kisaran itu sendiri secara langsung dilakukan Ketua Pengadilan Negeri melalui Hakim-hakim pengawas bidang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Koordinator Pengawas.

SK Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 78/SK/KPN/11/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB :

1. Koordinator Pengawas / Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H
2. Hakim Pengawas Bidang Ortala / Yohana Timora Pangaribuan, SH., M. Hum.,
3. Hakim Pengawas Bidang Pidana / Miduk Sinaga, SH.,
4. Hakim Pengawas Bidang Perdata / Antoni Trivolta, SH.,
5. Hakim Pengawas Bidang Hukum / Nelly Rakhmasari Lubis, SH., M.H.
6. Hakim Pengawas Bidang Keuangan, Umum dan Perpustakaan / Tetty Siskha, SH., M.H.
7. Hakim Pengawas Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara / Irse Yanda Perima, SH., M.H.

Secara rutin hasil temuan dari Hakim Pengawas akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk dilakukan evaluasi dan menjadi bahan dalam mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dan mendesak.

Selanjutnya pengawasan secara eksternal telah dilakukan secara terbuka kepada masyarakat luas. Pengadilan Negeri Kisaran telah menyediakan sarana dan prasarana kepada siapa saja untuk mengajukan laporan dan pernyataan keberatannya terhadap kinerja badan dan perorangan apar peradilan, baik secara tertulis maupun secara elektronik. Semua laporan dan pengaduan akan mendapat porsi penanganannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses dan mekanisme pelaporan dan pengaduan telah disosialisasikan secara terbuka di papan pengumuman dan tempat publikasi lain di Pengadilan Negeri Kisaran.

B. EVALUASI

Evaluasi dalam laporan ini dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat intern terkait pembahasan hasil kinerja aparat peradilan, sedangkan tindakan evaluasi itu sendiri merupakan bagian dari tupoksi Pengadilan Negeri Kisaran yang finalisasi dari evaluasi itu sendiri nantinya akan berujung pada pimpinan Pengadilan Negeri Kisaran. Secara rutin tindakan evaluasi kinerja tersebut selanjutnya dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan, yaitu dalam rapat Kepaniteraan, Kesekretariatan serta dalam rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparat peradilan.



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Kisaran. Penanganan perkara berjalan dengan sangat baik dengan rasio penanganan perkara sebesar 94,33%. Anggaran DIPA dapat direalisasikan dengan maksimal sesuai dengan program dan output yang ditetapkan. Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA sebesar 99,68% dan DIPA 03 Ditjen Badilum sebesar 99,70%. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka Aparatur Pengadilan telah diikutsertakan dalam berbagai Diklat dan sertifikasi, pelatihan, seminar dan sosialisasi yang berkaitan dengan Tupoksinya masing-masing.

Untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas maka Pengadilan Negeri Kisaran telah memiliki sarana maupun prasarana yang cukup memadai. Gedung kantor yang bersih dan nyaman serta tersedia fasilitas untuk penyandang disabilitas. Sarana ruang PTSP, ruang tunggu pengunjung yang nyaman serta berbagai aplikasi pendukung untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait layanan pengadilan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, Pengadilan Negeri Kisaran telah memiliki kinerja yang baik dalam penanganan perkara, administrasi dan anggaran. Namun kami menyadari bahwa masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan dan dibutuhkan dukungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Menambah Diklat sumber daya manusia terutama bidang teknologi (IT);
2. Menambah Volume Anggaran Belanja Barang Operasional.
3. Menambah Pagu Anggaran Belanja Modal dan Anggaran untuk Pembangunan Sarana Prasarana.
4. Menambah jumlah pegawai.

LAMPIRAN



Rapat Rutin Kepaniteraan



Rapat Rutin Kesekretariatan



Rapat Rutin Koordinator Pengawasan dan Hakim Pengawas



Rapat Rutin Bulanan



Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan



Rapat Zona Integritas Pengadilan Negeri Kisaran tahun 2022



Acara Ramah Tamah Bersama Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Pusat / Hakim Agung Mahkamah Agung RI Yang Mulia Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Kisaran



Pertandingan Tenis KPT Medan Cup IV 2022 di Kisaran



Kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Medan dalam rangka pengawasan dan pembinaan pada Pengadilan Negeri Kisaran



Opening/Closing Meeting Pengawasan/Pembinaan, Surveilans APM dan Pendampingan ZI



Apel Senin Pagi yang di ikuti oleh Hakim Pejabat Fungsional&Struktural, ASN dan PPNPN



Apel Jumat Sore yang di ikuti oleh Hakim Pejabat Fungsional&Struktural, ASN dan PPNPN

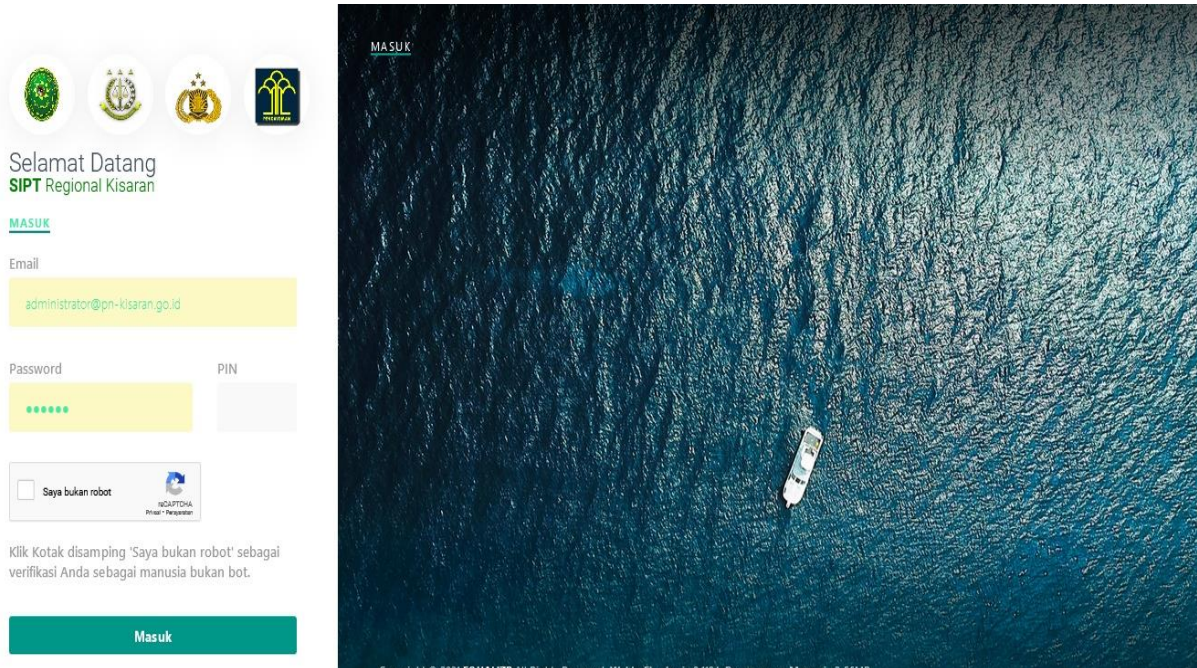


Supervisi PTSP



DAFTAR INOVASI PENGADILAN NEGERI KISARAN

1. APLIKASI SIPT (SISTEM INFORMASI PIDANA TERPADU)



Sistem Informasi Pidana Terpadu adalah salah satu aplikasi yang mengintegrasikan pengadilan dengan stakeholdernya yaitu kejaksaan, kepolisian dan lembaga pemasyarakatan, dimana polisi bisa mengajukan permohonan izin sita dan izin geledah melalui aplikasi langsung tanpa harus datang lagi ke Pengadilan Negeri Kisaran

2. APLIKASI SITASYA (SILAHKAN TANYA SAYA)

PENGADILAN NEGERI KISARAN IB
Jl. Jen. Ahmad Yani No. 33 Kec. Kota Kisaran Barat
Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21211

Hai, Saya SITASYA (SILAHKAN TANYA SAYA)
ASISTEN VIRTUAL PENGADILAN NEGERI KISARAN

Ada Yang Bisa Saya Bantu...?
Silahkan scan QRCode atau simpan nomor SITASYA

0812 6584 6300

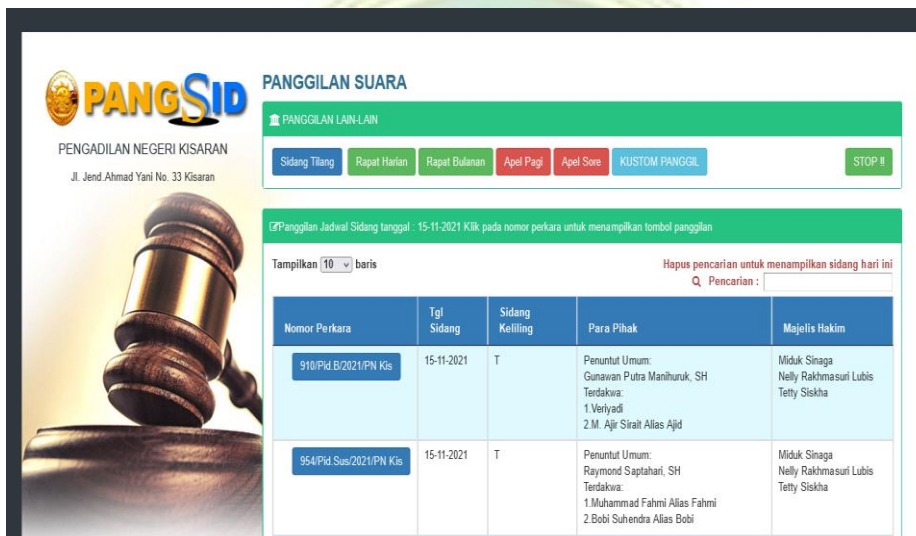
Informasi :
- Surat Keterangan Online / Eraterang
- E-Court
- Siwas

Si-Tasya- Asisten Virtual Pengadilan Negeri Kisaran merupakan Inovasi berbasis WhatsApp (WA) Gate-Way yang menginformasikan tentang:

1. Info perkara
2. Jadwal Sidang
3. Info Tilang
4. Sisa Panjar
5. Putusan
6. Sita/Geledah

Dimana, jika pencari keadilan cukup mengirim pesan dan secara otomatis akan diarahkan pada info apa saja yang kita inginkan maka akan secara otomatis akan dibalas oleh siTasya sesuai informasi yang diinginkan.

3. APLIKASI PANGSID (PANGGILAN SIDANG AUDIO)



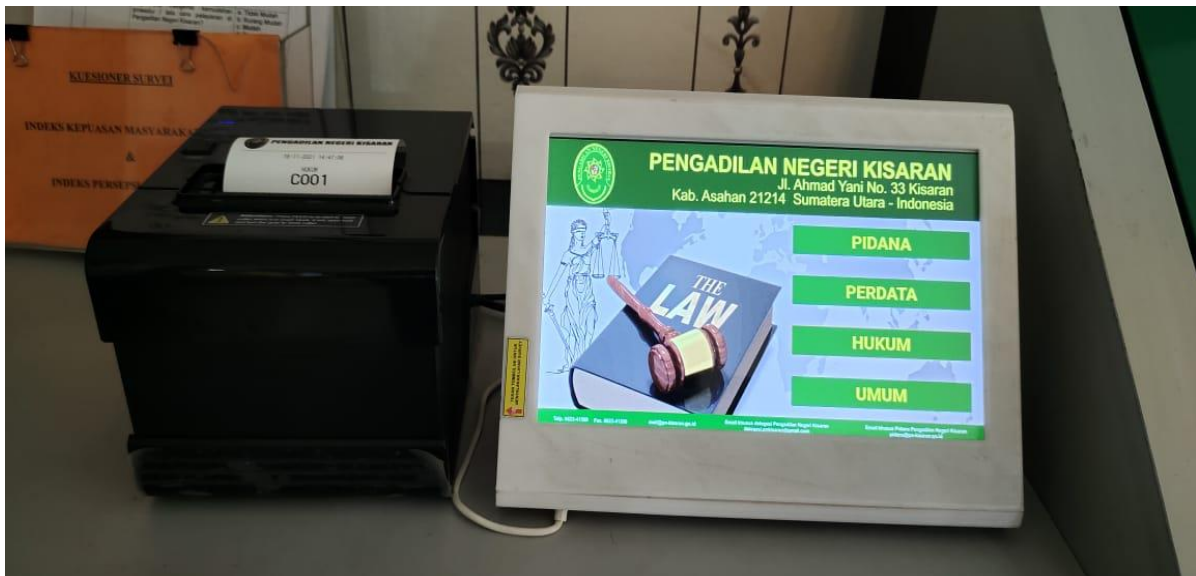
Aplikasi ini merupakan audio pemanggil untuk memanggil Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan para pihak dalam perkara perdata dan pidana untuk memasuki ruang sidang yang ditentukan.

4. E-BROSUR (BARCODE LAYANAN)



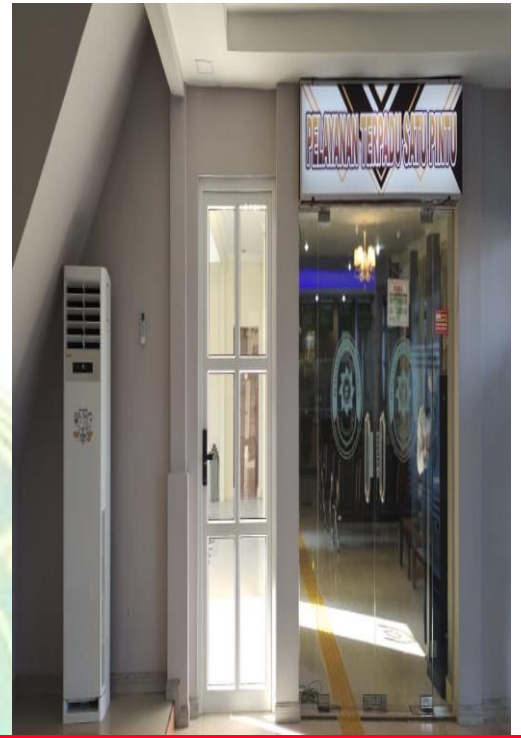
E-Brosur merupakan Brosur berbasis eletronik yang berisi informasi layanan Pengadilan Negeri Kisaran sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui jenis -jenis layanan Pengadilan Negeri kisaran hanya dengan cara scan bar-code yang dimuat di web site dan ruang PTSP.

5. MESIN ANTRIAN PTSP

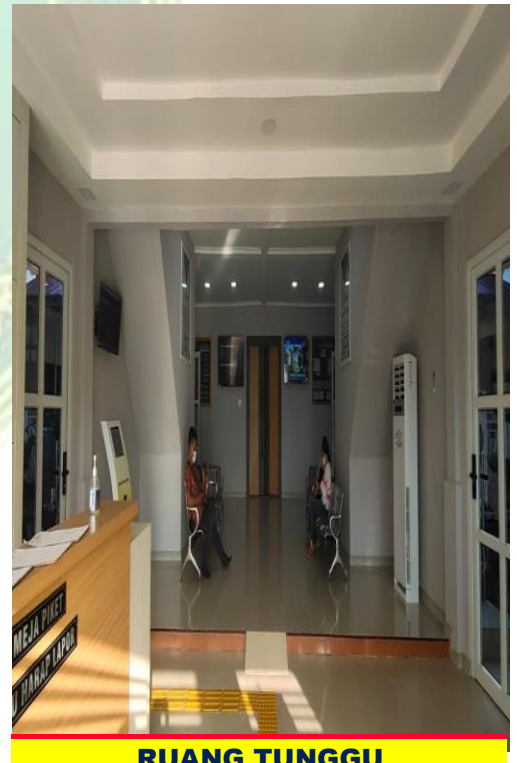


Mesin antrian bagi pengguna layanan di PTSP PN Kisaran sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan

INOVASI SARANA DAN PRASARANA PENGADILAN NEGERI KISARAN



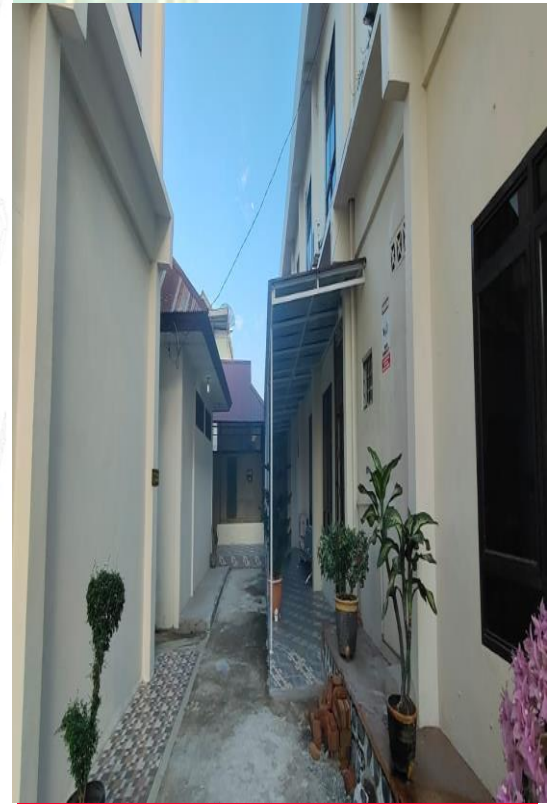
AREA STERIL / ACCESS CARD DOOR



RUANG TUNGGU



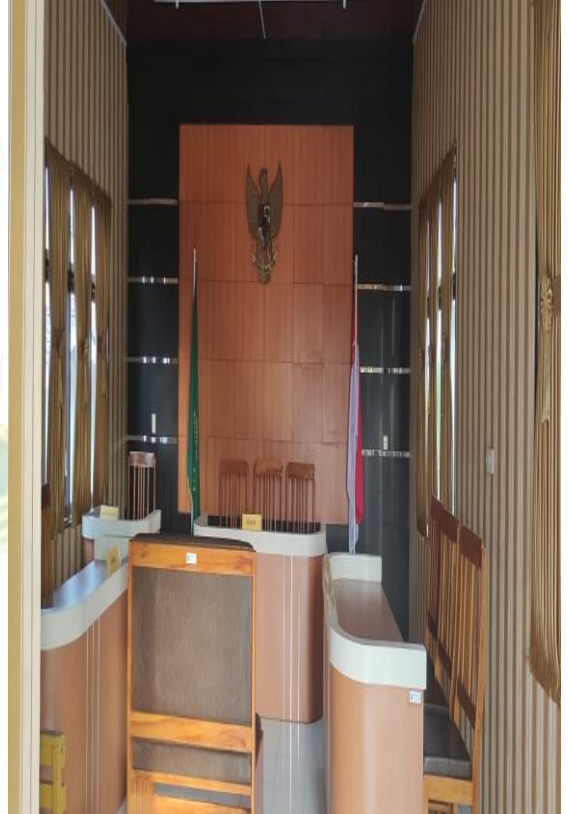
**JALUR PENGUNJUT / PAGAR
PEMBATAS**



JALUR KE TOILET UMUM

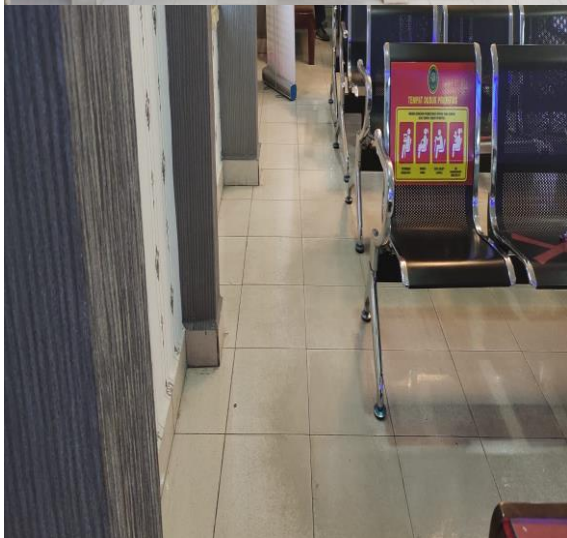


GEDUNG SIDANG ANAK

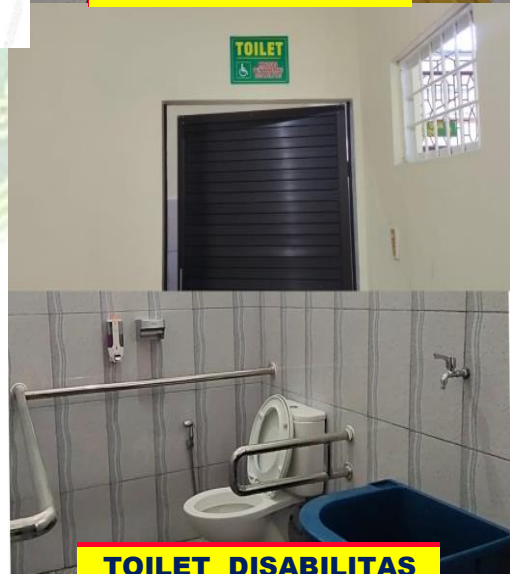




RUANG LAKTASI



GUIDING BLOCK



TOILET DISABILITAS

SARANA DISABILITAS

KARTU PRIORITAS



KURSI RODA, TONGKAT PUTIH



ALAT BANTU DENGAR



ALAT BANTU DENGAR



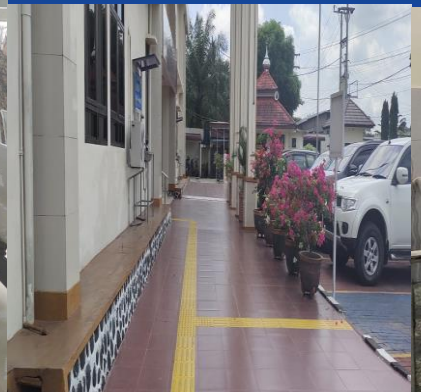
BROSUR BRAILLE



DROP ZONE



TEMPAT DUDUK PRIORITAS



GUIDING BLOK



TOILET DISABILITAS



PARKIR DISABILITAS

PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS I B DI TAHUN 2022



Penghargaan Peringkat Terbaik I Pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2022 Kategori Pengadilan Negeri I B dengan perkara 1001 s/d diatas 2000



Lomba Hymne/Mars Peradilan Umum Tahun 2022 dan mendapat Peringkat Juara Harapan III Nasional



Anugerah Penghargaan Mahkamah Agung RI Peringkat III sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Perdata Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 501-1000



Penerimaan Penghargaan Juara 3 Penyerapan Anggaran (DIPA) Kategori Kecil Tahun 2022



Peringkat satu pengelolaan kinerja APBN Kategori jumlah Pagu DIPA kelolaan sedang Periode Semester I TA 2022 lingkup satker Mitra KPPN Tanjung Balai



Peringkat satu pengelolaan kinerja APBN kategori jumlah pagu DIPA kelolaan sangat kecil periode Semester I TA 2022 Lingkup satker Mitra KPPN Tanjung Balai



Peringkat sepuluh Kinerja Terbaik penggunaan uang persediaan dengan implementasi KKP Periode Semester I ta 2022 Lingkup satker mitra KPPN Tanjung Balai



Pemberian Apresiasi Atas Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pelaksanaan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Sumatera Utara (Kekayaan Negara Rewards) Tahun 2022

FAMILY GATHERING

